

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 konteks Penelitian

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa berfungsi sebagai ujung tombak didalam melaksanakan pembangunan disegala bidang baik dibidang pemerintahan, pembangunan, maupun kemasyarakatan (Mardiana, 2017). Pemerintah desa diberikan wewenang oleh pemerintah di atasnya dalam mengatur berbagai pemerintahan dengan berbagai langkah strategis yang harus dipedomani oleh pemerintah desa. Menurut UU No 6 Tahun 2014 Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. UU No 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Melalui asas otonomi daerah, konsentrasi pembangunan terarah pada daerah kabupaten dan kota, dimana dalam lingkup kabupaten atau kota tersebut terdapat unit pemerintahan terkecil yang bersinggungan langsung kepada masyarakat di pedesaan yaitu pemerintahan desa. Berbagai program telah digulirkan oleh

pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan daerah kabupaten dan kota hingga pada menyentuh sektor pedesaan. Program-program pemerintah pusat dalam perhatiannya terhadap pembangunan desa terjabarkan melalui ketersediaan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) melalui dana alokasi umum (DAU) atau dana alokasi khusus (DAK). Meski pendekatan anggaran telah menjadi perhatian pemerintah pusat namun pada aspek implementasi sebagai suatu dimensi yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat dikarenakan berbagai hal seperti anggaran yang diperuntukan kurang maksimal, terjadinya kebocoran anggaran sewaktu pelaksanaan dan bentuk lainnya. Keadaan seperti itu dapat membuat lambatnya pembangunan di level desa, padahal level di level desa atau tepatnya peranan pemerintah desa amat strategis dalam mensukseskan visi, misi serta program pemerintahan daerah.

Pemerintah desa dalam melaksanakan fungsinya serta untuk mendukung terealisasi program-program pemerintahan daerah maka penting untuk menghadirkan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung kinerja pemerintah desa, sarana dan prasarana tersebut dapat berupa pembangunan infrastruktur pedesaan yang disamping dapat mendukung kinerja pemerintah desa juga dapat membantu percepatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Infrastruktur desa menjadi hal yang penting untuk meningkatkan kemandirian dan perekonomian warga desa. Dengan pembangunan infrastruktur desa tersebut, dampak ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat desa diharapkan meningkat. Seringkali pembangunan infrastruktur menemui kendala, terutama

karenaterbatasnya akses masyarakat terhadap pengambilan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah.

Oleh sebab itu, masyarakat desa seringkali hanya dijadikan sebagai objek Pembangunan tanpa melihat sesungguhnya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pembangunan infrastuktur yang telah dibangun seringkali tidak dimanfaatkan secara optimal dan kurang dirawat karena masyarakat tidak mempunyai rasa memiliki atas sarana yang telah dibangun. Desain perencanaan dan pengelolaan yang ditentukan elit pemerintah, tingkat akuntabilitas yang rendah serta rentan manipulasi akibat kurang adanya transparansi dana yang dikelola menyebabkan lingkaran praktik korupsi terjadi di desa. Tidak heran jika seringkali kita menemui kualitas pembangunan infrastuktur desa yang buruk, misalnya jalan baru dibangun satu tahun tetapi kondisinya sudah rusak dan berlubang.

Pemerintah mulai memperkenalkan program pembangunan yang melibatkan masyarakat dimulai dari tahapan pengusulan kegiatan/proyek sampai dengan pemeliharannya. Salah satu program dengan pelibatan masyarakat yang telah dilaksanakan oleh pemerintah adalah PPIP (Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan). Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan nasional agar laju pembangunan infrastruktur kota dan pembangunan daerah dan desa semakin seimbang dan serasi.

Perencanaan pembangunan yang transparan dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastuktur menjadi hal yang fundamental untuk dijalankan demi meminimalisir tindak penyimpangan dan ketidaktepatan sasaran program yang telah direncanakan. Masyarakat desa hendaknya dijadikan sebagai aktor

pembangunan, sehingga infrastruktur yang terwujud merupakan pembangunan dari, oleh, dan untuk masyarakat desa. Evaluasi Program dimaksudkan untuk menganalisis, menilai dan melihat pencapaian target program. Untuk menentukan seberapa jauh target program sudah tercapai yang dijadikan tolak ukur adalah tujuan yang sudah dirumuskan dalam tahap perencanaan kegiatan. Desa Pangahu merupakan salah satu desa yang terdapat anggaran dana desa yang digunakan untuk pembangunan desa dan pemeliharaan infrastruktur, pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, pembangunan dan pemeliharaan pendidikan, serta pengembangan usaha ekonomi produktif

Dana Desa yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa diarahkan untuk meningkatkan kapasitas warga dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, perluasan skala ekonomi individu kelompok masyarakat, honor Tim Pelaksana Dana Desa, dan penguatan kelembagaan desa dan kegiatan desa lainnya yang dianggap penting.

Tabel 1.1 Daftar Sektoral Pembangunan Desa Pangahu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo

No	Jenis Kegiatan	Anggaran 2017	Anggaran 2018	Anggaran 2019	Realisasi
1.	Pembangunan Jembatan Beton Desa	Rp. 133.136.500	Rp. 161.665.500	Rp. 280.984.000	Terlaksana
	Pembangunan Jalan	Rp. 344.707.500	-	-	Terlaksana

Sumber : Kantor Desa Pangahu Kec. Asparaga Kab. Gorontalo (2021)

Berdasarkan hasil pada tabel 1.1 bahwa distribusi anggaran sektoral pembangunan desa Pangahu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo berdasarkan Pembangunan Jembatan Beton Desa pada tahun 2017 memiliki peningkatan anggaran sebanyak 45% dari tahun 2017-2019 dan sudah terlaksana. Sedangkan untuk anggaran Pembangunan Jalan pada tahun 2017 memiliki anggaran sebanyak Rp. 344.707.500 dan sudah terlaksana tetapi belum maksimal. Salah satu program pembangunan infrastruktur yang sudah terealisasi yaitu pembangunan jembatan beton di Kabupaten Gorontalo pada tahun 2017. Dimana proses pembangunan jembatan beton yang menjadi penghubung dari dusun Siliasi menuju dusun Alawahu.

Sebelum proses pembangunan jembatan ini hanya kendaraan bermotor yang dapat melalui jembatan tersebut, dikarenakan jembatan mudah untuk runtuh jika dilalui kendaraan besar seperti roda empat. Sedangkan untuk pembangunan jalan belum terlaksana dikarenakan anggaran yang masuk belum memenuhi proses pembuatan jalan, sehingga jalan belum maksimal untuk dilalui. Berdasarkan masalah di atas maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Program Pembangunan Infrastruktural Desa Pangahu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo”**

1.2 Fokus dan Sub Fokus Penelitian

Bersarkan konteks penelitian maka yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Pelaksanaan Pembangunan, Infrastruktur di Desa Pangahu Kecamatan Asparaga kabupaten Gorontalo dengan Sub Fokus:
 - a. Bagaimana Perencanaan Pembangunan Infrastruktur di Desa Pangahu Kec. Asparaga Kabupaten Gorontalo?
 - b. Bagaimana Pelaksanaan Pembangunan infrastruktur di Desa Pangahu Kec. Asparaga Kab.Gorontalo?
 - c. Bagaimana Evaluasi Pembangunan Infrastruktur di Desa Pangahu Kec. Asparaga Kab.Gorontalo?
2. Faktor penentu keberhasilan program pembangunan infrastruktur Desa Pangahu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo dengan sub fokus penelitian:
 - a. Bagaimana faktor Kualitas sumber daya manusia pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa pangahu kecamatan asparaga kabupaten gorontalo
 - b. Bagaimana faktor Sumber daya finansial pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur di desa pangahu kecamatan asparaga kabupaten gorontalo
 - c. Bagaimana faktor Masalah teknis pada pelaksanaan pembangunan insfrakstruktur didesa pangahu kecamatan asparaga kabupaten gorontalo

- d. Bagaimana Tata kelola pemerintah di desa pangahu kecamatan asparaga

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus dan sub fokus diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program pembangunan infrastruktur Desa Pangahu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo
2. Untuk mengetahui faktor penentu keberhasilan program pembangunan infrastruktur Desa Pangahu Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan pengembangan ilmu dalam bidang studi yang membahas mengenai Evaluasi Program Pembangunan Infrastruktur Desa. Dan semoga penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber data untuk penelitian selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis merupakan penjelasan kepada pihak-pihak mana saja yang kiranya hasil penelitian Penulis dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat praktis dari penelitian bagi beberapa pihak diantaranya yaitu :

1. Bagi Pemerintahan Desa

Memberikan kontribusi bagi Pemerintahan Desa untuk menambah kajian dan pengetahuan mengenai program pembangunan infrastruktur Desa, sebagai

bahan evaluasi untuk tahun-tahun selanjutnya dalam program pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan kembali.

2. Bagi Masyarakat Desa

Memberikan kontribusi bagi pihak masyarakat Desa sebagai peningkatan perekonomian masyarakat di desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta meningkatkan daya saing serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

3. Bagi Penulis dan peneliti selanjutnya

Menambah wawasan ilmu dalam bidang Administrasi dan Akuntansi Desa,sertasebagailandasanbagipenelitianselanjutnya.